

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Adrian Sutedi, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 22
- Adrian Sutedi, S. H. M. H. (2023). *Sertifikat hak atas tanah*. Sinar Grafika.
- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), Cet. ke.11, hlm. 122.
- Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, *Panduan Mengurus Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Legality, Yogyakarta, hal.1
- Elfa, R. M., Idayanti, S., & Taufik, M. (2024). *Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Tingkat Pengadilan Tinggi*. Penerbit NEM.
- Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., & Moechtar, O. (2020). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press.
- James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 197
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Khasanah, D. D., Iftitah, A., Abas, M., Sipayung, B., Hastarini, A., Arifuddin, Q., & Rohmah, A. N. (2023). *Hukum perdata*. Sada Kurnia Pustaka.
- LJ. Van Apeldoorn. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka. halaman 101.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Mudakir Iskandar Syah, S. H. M. H. (2019). *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Bhuana ilmu populer.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahmat Ramadhani, *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah, Op.Cit.*, halaman 51.

- Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan:Pustaka Prima, halaman 2.
- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Salim Hs dan Erlies Septiana. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok:Rajawali Pers, halaman 56.
- Santoso, U., & SH, M. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media.
- Sembiring, J. J., & SH, M. (2010). *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. VisiMedia.
- Sihombing, I. D. R., & SH, M. (2022). *Cacat Administrasi: Pembatalan Sertifikat Tanah oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan*. Prenada Media.
- Utama, H. K. & I. W. K. J. (2021). *Hukum Agraria Hak Atas Tanah (Sertifikat Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Era Digital)*. Indomedia Pustaka.
- Windari, R. A., & SH, M. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada

ARTIKEL DALAM JURNAL ILMIAH

- ABIYAL, J. A., & Cahyono, A. (2024). *ANALISIS PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN HUKUM PROGRESIF* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- Aniscasary, S., & Ramasari, R. D. (2022). Tinjauan yuridis kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 1 tahun 2021. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 1-14.
- Atikah, N. (2022). Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(3), 263-289.

- Baiq, P. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *DIKTUM*, 149-165.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Camat dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 905-916.
- Dian Aries, "Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Elektronik", *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 7 No.1 Mei 2021, halaman 58
- Dilapanga, R. A. (2017). Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. *Lex Crimen*, 6(5).
- Duppa, P. F., Soepeno, M. H., & Kermite, J. A. (2024). KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA (STUDI KASUS SERTIFIKAT GANDA). *LEX ADMINISTRATUM*, 12(2).
- Eka NAM Sihombing dan Rudy Hendra Pakpahan, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanakan Jaminan Sosial", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No,2 – Juli 2012, halaman 169
- Febrianti, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik. *Indonesian Notary*, 3(3), 9.
- Hadisiswati, I. (2014). Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 118-146.
- Ilhami, D. A. S. (2022). Data privasi dan keamanan siber pada smart-city: Tinjauan literatur. *Jurnal Sains, Nalar, Dan Aplikasi Teknologi Informasi*, 2(1), 51-60.

- Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 115-138.
- Juliyanti, N. K. E. D., Dharsana, I. M. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 91-96.
- Kaunang, M. C. (2016). Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Lex Crimen*, 5(4).
- Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 115-124.
- Masri, E. (2023). Kebijakan penerbitan sertipikat elektronik pada sistem pendaftaran tanah di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 157-174.
- Mirna, M. (2023). Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 16-30.
- Monalu, T. J. (2023). Kedudukan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah Ke Sistem Elektronik Sebagai Jaminan Keamanan. *Lex Privatum*, 11(2).
- Muhammad Yusrizal, “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” , *De Lega Lata*, Vol. 2 No. 1 Januari-juni 2017 halaman 128.
- Munir, Misbahul, Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum san Maqasid Asy-Syari’ah. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Malang 2023.
- Nafisah, R. (2022). Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik. *Dinamika*, 28(3), 3497-3518.
- Nasir, S. M. (2024). TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SERTIFIKAT TANAH GANDA DI

KABUPATEN GORONTALO. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(11), 1106-1116.

Putra, R. A., & Winanti, A. (2024). Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 835-852.

Qisthi Fauziyyah Sugianto, "Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital," *Jurnal Notarius Volume 12 Nomor 2 (2019)*: 657-658.

Rahmat Ramadhani, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Terhadap Hak Atas Tanah", *SOSEK: Jurnal sosial dan ekonomi*, Vol.2 No.1, Tahun 2021, halaman 32.

Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah", *De Lega Lata: Jurnal ilmi Hukum*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2017, halaman 140.

Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.

Sapardiyono Sapardiyono and Sukmo Pinuji, Vol.2, No.1, 'Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan Dan Hak Atas Tanah Melalui Sertipikat Tanah Elektronik, (2022). hal 54

Saputra, C. D., Saputra, G. S., Aprilliani, F., & Martinelli, I. (2024). Perspektif Hukum terhadap Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).

Satria, A., Ulina, N. P. H., Safira, P., & Pangestu, B. (2024). PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA: TANTANGAN DAN SOLUSI DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI. *Warta Dharmawangsa*, 18(1), 177-192.

Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber. *Sasi*, 27(1), 38-52.

Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-142.

Sulistyowati, E. D., Suraji, S., & Subekti, R. (2022, August). pengaturan dan kepastian hukum penerbitan sertifikat elektronik Dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

Susilowati, I. F. TINJAUAN YURIDIS SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DI INDONESIA.

Triana Rejekiningsih, "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negeri Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)," *Jurnal Yustitia* 5, no. 2 (2006): 306–7

Windari, R. A. (2010). DILEMA HUKUM PENYERTIFIKATAN TANAH AYAHAN DESA DI BALI (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Panglipuran). *Jurnal IKA*, 8(2).

SKRIPSI/THESIS/DISERTASI

ABIYAL, J. A., & Cahyono, A. (2024). *ANALISIS PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN HUKUM PROGRESIF* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).

Munir, Misbahul, Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum san Maqasid Asy-Syari'ah. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Malang 2023.

ARTIKEL DALAM INTERNET

BFI FINANCE, Sertifikat Tanah Elektronik adalah : Definisi, Keunggulan dan cara buat, Diakses pada tanggal 22 November 2024,

Detik properti, Mengenal Sertifikat Elektronik : Pengertian, Ketentuan, dan Manfaatnya , Diakses pada tanggal 19 Oktober 2024,

https://www.detik.com/properti/kepemilikan_rumah/

Diakses pada tanggal, 3 Desember 2024,

gethome.id, Sertifikat Tanah Elektronik : pengertian dan Cara Mengubahny

<https://blog.gethome.id/2025/02/sertifikat-tanah-elektronik>

<https://www.bfi.co.id/id/blog/sertifikat-tanah-elektronik-adalah>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam kegiatan Pendaftaran Tanah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461)

Malaysia National Land Code (*Act 56 of 1965*)

